

EKSPRESI IDEOLOGI KEAGAMAAN: MENYELAMI KONTROVERSI POLITIK IDENTITAS DI INDONESIA

Dedi Susanto¹, Muhammad Amri Tajudin² Abdullah Thalib³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail: dedisusantoktg@gmail.com

ABSTRAK

Kontestasi ideologi keagamaan dalam politik identitas di Indonesia telah menjadi fenomena sosial yang signifikan, memengaruhi dinamika politik dan hubungan antar agama di negara yang pluralistik ini. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran ideologi keagamaan dalam politik identitas dan dampaknya terhadap kehidupan sosial di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis literatur dan studi kasus, seperti Pilkada DKI Jakarta 2017, untuk menggambarkan bagaimana agama dipolitisasi untuk memperoleh dukungan politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik identitas berbasis agama semakin dominan dalam ruang publik, memperburuk polarisasi sosial di kalangan umat beragama, dan meningkatkan diskriminasi terhadap kelompok minoritas agama. Media sosial memainkan peran penting dalam mempercepat penyebaran ideologi berbasis agama, sementara negara, melalui kebijakan Pancasila, berusaha menjaga keharmonisan sosial di tengah perbedaan. Artikel ini menyimpulkan bahwa meskipun kontestasi ideologi keagamaan dapat memperburuk ketegangan sosial, dialog antar agama dan peningkatan toleransi sosial dapat menjadi kunci untuk meredakan dampak negatif tersebut dan menjaga persatuan dalam keberagaman di Indonesia.

Kata kunci: Kontestasi Ideologi Keagamaan; Politik Identitas

ABSTRACT

The contestation of religious ideology in identity politics in Indonesia has become a significant social phenomenon, affecting political dynamics and inter-religious relations in this pluralistic country. This article aims to analyze the role of religious ideology in identity politics and its impact on social life in Indonesia. The research uses a qualitative approach with literature analysis and case studies, such as the 2017 Jakarta elections, to illustrate how religion is politicized to gain political support. The results show that religion-based identity politics is increasingly dominant in the public sphere, exacerbating social polarization among religious believers, and increasing discrimination against religious minorities. Social media plays an important role in accelerating the spread of faith-based ideologies, while the state, through its Pancasila policy, seeks to maintain social harmony amid differences. The article concludes that while religious ideological contestation can exacerbate social tensions, interfaith dialog and increased social tolerance can be key to mitigating such negative impacts and maintaining unity in diversity in Indonesia.

Keywords: Contestation of Religious Ideology; Identity Politics

A. PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara dengan keberagaman agama dan budaya yang sangat kaya, menghadapi tantangan besar dalam menjaga keharmonisan antar umat beragama. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia seharusnya menjadi contoh dalam menghargai pluralisme dan keragaman (Anggita Ramadhan, 2019; Nashohah, 2021). Namun, dalam beberapa dekade terakhir, kita menyaksikan meningkatnya peran politik identitas berbasis agama yang semakin menguat dalam ruang publik. Politik identitas ini, yang memanfaatkan agama sebagai alat untuk meraih kekuasaan, telah menciptakan perpecahan dan polarisasi yang lebih tajam dalam masyarakat Indonesia (Ikhwan, 2019). Fenomena ini tidak

hanya memperburuk hubungan antar kelompok agama, tetapi juga mempengaruhi integrasi sosial dan stabilitas politik di tingkat nasional.

Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, yang juga mengakui keberagaman agama sebagai bagian dari identitas nasional. Keberagaman agama dan suku bangsa merupakan kekuatan besar yang harus dijaga dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Akan tetapi, meskipun ideologi dasar negara, yakni Pancasila, mengedepankan nilai-nilai pluralisme dan toleransi, belakangan ini muncul kecenderungan bahwa politik identitas berbasis agama menjadi alat yang sangat kuat dalam memobilisasi massa, bahkan memperburuk polarisasi sosial dan politik (Azra, 1998).

Politik identitas berbasis agama menjadi fenomena yang semakin menonjol di Indonesia, dengan kelompok-kelompok tertentu yang menggunakan agama untuk memperjuangkan kepentingan politik mereka. Hal ini dapat dilihat dalam berbagai peristiwa politik terkini, seperti Pilkada DKI Jakarta 2017, yang menciptakan ketegangan antara kelompok mayoritas dan minoritas berdasarkan identitas agama. Seperti yang diungkapkan oleh Rieff (2006), dalam masyarakat yang plural, politik identitas sering kali digunakan untuk membangun kohesi internal kelompok tertentu, tetapi di sisi lain juga dapat menimbulkan perpecahan di masyarakat yang lebih luas (Aspinall & Mietzner, 2019).

Fenomena ini bukanlah hal baru dalam sejarah Indonesia. Sejak kemerdekaan, Indonesia telah berjuang untuk menyatukan berbagai kelompok agama dan etnis yang ada, dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika (berbeda-beda tetapi tetap satu). Namun, dalam beberapa tahun terakhir, semakin maraknya penggunaan agama dalam politik menunjukkan bahwa kontestasi ideologi keagamaan semakin menguat, bahkan digunakan sebagai alat untuk meraih kekuasaan politik.

Ayat Al-Qur'an, dalam QS. Al-Hujurat :13, menegaskan pentingnya keragaman dan saling mengenal tanpa menjadikannya sebagai pemicu perpecahan :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahannya: Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.

Ayat ini mengingatkan umat manusia untuk melihat keragaman sebagai sarana untuk saling memahami, bukan untuk saling memusuhi.

Namun, dalam kenyataannya, identitas agama sering kali dimanfaatkan untuk tujuan politik, baik oleh individu maupun kelompok. Hal ini menyebabkan masyarakat semakin terpecah, dengan munculnya ketegangan antar agama dan berbagai bentuk intoleransi yang semakin jelas terlihat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kontestasi ideologi keagamaan dalam membentuk dinamika politik dan sosial di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui analisis literatur dan studi kasus, penelitian ini akan menggali bagaimana ideologi keagamaan digunakan dalam politik identitas dan dampaknya terhadap kehidupan sosial di Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran lebih jelas tentang bagaimana agama dapat digunakan untuk memperkuat atau memperburuk polarisasi sosial, serta peran negara dan masyarakat dalam mengelola kontestasi ideologi keagamaan ini.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis kontestasi ideologi keagamaan dalam politik identitas di Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena fokus penelitian ini adalah untuk memahami secara mendalam fenomena sosial yang tidak dapat dijelaskan atau diukur dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dinamika sosial, politik, dan budaya yang berkaitan dengan penggunaan agama dalam politik identitas, serta dampaknya terhadap hubungan antar agama dan stabilitas sosial di Indonesia.

Data yang digunakan dalam penelitian ini sepenuhnya berasal dari sumber sekunder. Jenis sumber data meliputi Buku akademik yang membahas politik identitas, ideologi keagamaan, dan dinamika sosial di Indonesia. Artikel jurnal ilmiah dari disiplin ilmu politik, sosiologi, dan studi agama. Laporan media yang mendokumentasikan peristiwa politik dengan isu agama, seperti Pilkada DKI Jakarta 2017.

Menurut (Sugiyono, 2015), pendekatan kualitatif sangat efektif untuk penelitian yang berfokus pada pemahaman fenomena dalam konteks sosial yang kompleks. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali makna dan tafsiran yang lebih mendalam terhadap suatu peristiwa atau fenomena, serta memberikan wawasan yang lebih kaya tentang konteks yang membentuk fenomena tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan pada pemahaman kontestasi ideologi keagamaan dalam politik identitas sebagai sebuah fenomena sosial yang melibatkan aktor-aktor sosial, kelompok agama, dan kebijakan negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua teknik utama, yaitu analisis literatur dan studi kasus. Analisis literatur bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber informasi yang relevan dengan topik penelitian, baik dari buku, artikel ilmiah, laporan media, maupun penelitian terdahulu. Sumber-sumber ini memberikan dasar teori dan kerangka pemikiran yang diperlukan untuk memahami fenomena kontestasi ideologi keagamaan dalam politik identitas, serta untuk memetakan dinamika yang terjadi di Indonesia. Penelitian ini juga menggunakan kajian pustaka dari berbagai disiplin ilmu, seperti ilmu politik, sosiologi, dan studi agama, untuk memberikan perspektif yang lebih luas terhadap fenomena yang diteliti.

Teknik analisis data ini menggunakan konten analisis isi dengan menggali lebih dalam mengenai peran agama dalam politik identitas di Indonesia, dengan fokus pada beberapa peristiwa politik yang mengangkat isu agama, seperti Pilkada DKI Jakarta 2017.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kontestasi ideologi keagamaan dalam politik identitas di Indonesia telah menjadi fenomena sosial yang semakin kompleks, memengaruhi hubungan antar agama, kebijakan politik, serta kehidupan sosial masyarakat. Dalam konteks negara yang pluralis seperti Indonesia, di mana agama menjadi faktor yang sangat signifikan dalam identitas sosial dan politik, kontestasi ideologi keagamaan sering kali digunakan sebagai alat untuk memperoleh dukungan politik. Dinamika ini dipicu oleh semakin kuatnya polarisasi di kalangan kelompok agama, yang berkontribusi pada terbentuknya politik identitas berbasis agama yang semakin tajam.

Politik Identitas Berbasis Agama: Dinamika Sosial dan Politik

Politik identitas berbasis agama menjadi semakin relevan di Indonesia, terutama setelah pemilu-pemilu dan pilkada yang mengangkat isu-isu keagamaan sebagai salah satu alat untuk mobilisasi massa. Salah satu contoh yang paling mencolok adalah Pilkada DKI Jakarta 2017, di mana agama digunakan sebagai alat untuk memobilisasi pemilih. Kasus ini menunjukkan

bagaimana isu agama menjadi bagian penting dalam politik identitas, yang memperkuat atau meredam pilihan politik Masyarakat (Ikhwani, 2019). Kontestasi ideologi keagamaan yang terjadi dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 menandai puncak dari penggunaan agama dalam politik identitas. Dalam kampanye Pilkada tersebut, calon gubernur Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terlibat dalam persaingan yang kian dipertajam oleh faktor agama. Isu penistaan agama yang melibatkan Ahok menjadi pemicu utama bagi kontestasi ideologi keagamaan dalam politik identitas, di mana kelompok-kelompok agama, terutama ormas-ormas Islam, seperti Front Pembela Islam (FPI) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), terlibat dalam upaya memenangkan Anies yang lebih memiliki kedekatan dengan kelompok Islam konservatif. Hal ini menunjukkan bagaimana ideologi keagamaan dapat dipolitisasi untuk membentuk identitas politik kelompok tertentu, yang akhirnya menciptakan polarisasi di kalangan masyarakat Indonesia (Kaltsum, 2019).

Salah satu bentuk nyata dari fenomena ini adalah kasus Pilkada DKI Jakarta 2017, di mana isu agama digunakan sebagai alat untuk memenangkan pemilu, yang mengarah pada perpecahan sosial yang dalam (Albrecht, 2017).

Polarisasi Agama dalam Politik dan Dampaknya terhadap Kehidupan Sosial

Polarisasi sosial akibat politik identitas berbasis agama memengaruhi stabilitas sosial di Indonesia. Ketegangan yang muncul sering kali tidak hanya berdampak pada pilihan politik, tetapi juga pada hubungan antar kelompok agama. Sebagai contoh, polarisasi dalam Pilkada DKI Jakarta juga memicu perpecahan dalam masyarakat, terutama antara kelompok Muslim konservatif dan kelompok Muslim moderat, serta antara umat Islam dengan kelompok non-Muslim. Polarisasi ini menciptakan ketegangan dan mengarah pada pemisahan sosial yang lebih tajam. Dalam beberapa kasus, hal ini mengarah pada kekerasan sosial, seperti yang terlihat pada serangan terhadap umat Ahmadiyah, serta diskriminasi terhadap kelompok minoritas agama lainnya. Diskriminasi agama menjadi semakin mencolok di berbagai daerah, yang pada gilirannya memengaruhi kebijakan pemerintah dalam menjaga harmoni antar agama.

Seperti yang tercatat dalam ayat Al-Qur'an, Al-Baqarah : 188 ;

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahan

Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

Ayat ini mengingatkan kita tentang pentingnya kejujuran dan integritas dalam menjaga hubungan sosial, tanpa menjerumuskan diri pada praktik-praktik yang merugikan kelompok lain, termasuk dalam kontestasi politik berbasis agama.

Media sosial memiliki peran yang signifikan dalam mempercepat proses kontestasi ideologi keagamaan di Indonesia. Sejak beberapa tahun terakhir, media sosial telah menjadi platform utama bagi kelompok-kelompok agama untuk memperkuat pengaruh politik mereka. Melalui media sosial, ideologi keagamaan dapat dengan mudah disebarkan kepada masyarakat luas, dengan narasi yang sering kali dipenuhi oleh muatan politis. Sebagai contoh, kelompok-kelompok agama konservatif menggunakan media sosial untuk mengorganisir kampanye-kampanye politik berbasis agama (Suryani, 2022). Mereka sering kali menggunakan media sosial untuk menyerang pihak-pihak yang mereka anggap tidak sejalan dengan ajaran agama mereka, bahkan melakukan kampanye negatif terhadap tokoh-tokoh politik tertentu yang

dianggap melanggar norma agama. Hal ini memperparah polarisasi politik dan sosial yang sudah ada (Pujiono, 2021).

Salah satu fenomena yang cukup signifikan adalah penyebaran hoaks dan disinformasi berbasis agama melalui media sosial. Informasi yang salah, baik yang bersifat politis maupun agama, dapat dengan cepat tersebar di masyarakat, menciptakan ketegangan dan memperburuk hubungan antar kelompok agama (Bahri & Sosial, 2021).

Seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an, Al-Hujurat : 6;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ لَنِيبِينَ

Terjemahan

Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu.

Ayat ini menekankan pentingnya verifikasi informasi sebelum mengambil tindakan, yang relevansinya semakin penting di era digital ini.

Kebijakan Negara dalam Mengelola Kontestasi Ideologi Keagamaan

Sebagai negara yang pluralistik, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mengelola kontestasi ideologi keagamaan, terutama dalam politik identitas. Negara memainkan peran penting dalam menciptakan kebijakan yang dapat mengurangi polarisasi yang terjadi, serta menjaga harmoni antara kelompok agama (Antara & Vairagya, 2018; Desky & Rijal, 2021)v. Salah satu ideologi yang digunakan negara untuk mengatasi tantangan ini adalah Pancasila, yang menjadi dasar negara Indonesia. Pancasila, sebagai ideologi negara, mengajarkan prinsip-prinsip toleransi dan kebhinekaan, yang diharapkan dapat mendorong dialog antar agama dan mengurangi ketegangan sosial.

Namun, kebijakan negara dalam mengelola isu-isu keagamaan sering kali terhalang oleh tekanan dari kelompok-kelompok agama yang memiliki pengaruh besar dalam politik. Oleh karena itu, peran lembaga-lembaga keagamaan, seperti MUI, menjadi sangat penting dalam mempertemukan berbagai pandangan ideologis untuk memastikan kebijakan negara tetap mengakomodasi keberagaman agama (Prasojo, 2012). Kontestasi ideologi keagamaan dalam politik identitas berdampak pada kehidupan sosial masyarakat. Polarisasi sosial yang terjadi akibat kontestasi ini tidak hanya menciptakan ketegangan politik, tetapi juga mempengaruhi hubungan antar agama. Dalam beberapa kasus, konflik ideologi berbasis agama telah menimbulkan diskriminasi terhadap kelompok minoritas agama, serta menciptakan ketegangan yang menghambat upaya pembangunan sosial yang inklusif. Tantangan terbesar bagi Indonesia adalah bagaimana meredakan polarisasi yang terjadi, menjaga toleransi antar agama, dan mendorong dialog antar kelompok. Hal ini memerlukan komitmen dari seluruh elemen masyarakat, termasuk negara, lembaga keagamaan, dan masyarakat sipil, untuk membangun kesadaran bersama tentang pentingnya menjaga kerukunan dan persatuan di tengah keberagaman (Kusroni, 2017)(Dimas Ramdan, 2019; Kusroni, 2017).

D. KESIMPULAN

Kontestasi ideologi keagamaan dalam politik identitas di Indonesia menunjukkan bahwa agama memiliki kekuatan yang besar dalam membentuk dinamika politik dan sosial di negara yang pluralistik ini. Peran agama dalam politik identitas semakin menonjol, terutama dalam

pemilu dan pilkada, di mana agama sering digunakan sebagai alat untuk memobilisasi dukungan politik. Salah satu contoh yang paling jelas adalah Pilkada DKI Jakarta 2017, di mana agama dipolitisasi untuk menggerakkan pemilih dan memperburuk polarisasi sosial antara kelompok Islam konservatif dan moderat. Polarisasi ini tidak hanya memengaruhi hubungan politik, tetapi juga memperburuk hubungan antar kelompok agama, menciptakan ketegangan yang mengarah pada diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Media sosial memainkan peran penting dalam mempercepat penyebaran ideologi berbasis agama, baik yang bersifat positif maupun negatif, memperburuk polarisasi yang sudah ada. Meskipun demikian, negara memiliki peran penting dalam mengelola kontestasi ideologi keagamaan dengan kebijakan yang mengedepankan toleransi, kebhinekaan, dan kesetaraan antar agama. Pancasila sebagai ideologi negara dapat menjadi dasar yang kokoh untuk menjaga keharmonisan sosial, meskipun implementasinya membutuhkan dukungan dari semua pihak, baik pemerintah, lembaga keagamaan, maupun masyarakat sipil. Secara keseluruhan, untuk menjaga persatuan dalam keberagaman, penting bagi Indonesia untuk mendorong dialog antar agama dan meningkatkan toleransi sosial guna mengurangi dampak negatif dari kontestasi ideologi keagamaan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Albrecht, H. (2017). Politics and Religion in Contemporary Indonesia: The 2017 Jakarta Gubernatorial Election. 5(3), 54-72. *Southeast Asian Studies*, 5(3), 54-72.
- Anggita Ramadhan, D. (2019). Menuju Penyederhanaan Partai Politik di Indonesia serta Dampaknya Terhadap Persatuan Bangsa. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(4), 570-597. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.570-597>
- Antara, M., & Vairagya, M. (2018). Keragaman Budaya Indonesia Sumber Inspirasi Inovasi. *Desain Komunikasi Visual, Sekolah Tinggi Desain Bali*, 2.
- Aspinall, E., & Mietzner, M. (2019). Pemilu yang Meresahkan di Asia Tenggara: Pluralisme Nondemokratis di Indonesia. *Jurnal Demokrasi*, 30(4), 104-118.
- Azra, A. (1998). *Esei-esei Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam*. Logos:Waca Ilmu.
- Bahri, S., & Sosial, M. (2021). LITERASI DIGITAL MENANGKAL HOAKS COVID-19 DI MEDIA. 10(1), 16-28.
- Desky, H., & Rijal, S. (2021). Pengembangan Kerukunan Masyarakat Multikultural Melalui Pendekatan Agama. *International Journal of Islamic Thought*, 20, 45-52. <https://doi.org/10.24035/ijit.20.2021.209>
- Dimas Ramdan, N. (2019). *Pesantren dan Radikalisme: Kajian Khusus Pondok Pesantren Al-Hamid, Jakarta Timur dalam Rangka Mencegah Paham Radikalisme*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Ikhwan, M. (2019). Ulama dan Konservatisme Islam Publik di Bandung: Islam, Politik Identitas, dan Tantangan Relasi Horizontal,” in , ed. by ,), 35-63. In I. Burdah, N. Kailani, & M. Ikhwan (Eds.), *Ulama, Politik, dan Narasi Kebangsaan*. PusPIDeP.
- Kaltsum, U. (2019). Politik dan Perubahan Paradigma Penafsiran Ayat-ayat Al-Qur'an dalam Proses Pilkada DKI Jakarta. *Jurnal At-Tibyan*, 4(1).
- Kusroni. (2017). Menelusik Sejarah Dan Keberagaman Corak Penafsiran Al-Qur'an. *El-Furqonia*, 05(2), 132-146.

- Nashohah, I. (2021). Internalisasi Nilai Moderasi Beragama melalui Pendidikan Penguatan Karakter dalam Masyarakat Heterogen. *Prosiding Nasional*, 4(November), 127–146.
<http://prosiding.iainkediri.ac.id/index.php/pascasarjana/article/view/68>
- Prasojo, Z. H. (2012). Dinamika Masyarakat Lokal Di Perbatasan. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 21(2), 417. <https://doi.org/10.21580/ws.2013.21.2.252>
- Pujiono, A. (2021). Media Sosial Sebagai Media Pembelajaran Bagi Generasi Z. *Didache: Journal of Christian Education*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.46445/djce.v2i1.396>
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suryani, T. (2022). Persaingan Internal Partai dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Politik Indonesia*, 15(3), 67–80.